

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN MELALUI
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
DI DINAS P3AKB SIDOARJO**

Aulia Okta Ramadhani¹, Siti Azizah²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

e-mail: oktajatirogo4@gmail.com, siti.azizah@uinsa.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan populasi tetap menjadi tantangan kritis bagi Kabupaten Sidoarjo, memerlukan kebijakan efektif yang menyeimbangkan ukuran populasi dengan sumber daya yang tersedia. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam jangkauan program, anggaran terbatas, dan kesadaran publik yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian populasi melalui perlindungan anak dan program perencanaan keluarga yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi dengan pejabat, petugas penyuluh, dan anggota masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang perencanaan keluarga dan perlindungan anak, berkontribusi pada penurunan angka kelahiran dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Namun, tantangan masih ada, termasuk resistensi budaya, kekurangan petugas penyuluh, dan akses layanan yang tidak merata. Studi ini mengisi kesenjangan penelitian dengan mengontekstualisasikan model implementasi Edwards III dalam kerangka pemerintahan populasi terdesentralisasi di Indonesia, memberikan wawasan teoretis tentang bagaimana struktur administratif lokal mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika implementasi kebijakan lokal dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan sumber daya manusia, dan memperluas cakupan layanan untuk memastikan upaya pengendalian populasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengendalian Populasi, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

Population growth remains a critical challenge for Sidoarjo Regency, requiring effective policies that balance population size with available resources. However, gaps persist in program outreach, limited budget, and uneven public awareness, especially in rural areas. This study aims to analyze the implementation of population control policies through child protection and family planning programs managed by the Sidoarjo Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service (P3AKB). Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation analysis with officials, extension workers, and community members. The findings show that the program has successfully raised public awareness about family planning and child protection, contributing to lower birth rates and improved maternal and child health. Nevertheless, challenges remain, including cultural resistance, shortage of extension workers, and unequal service access. This study fills the research gap by contextualizing Edwards III's implementation model within Indonesia's decentralized population governance framework, providing theoretical insights into how local administrative structures influence policy execution. The research contributes to understanding the dynamics of local policy



implementation and offers recommendations to strengthen cross-sector collaboration, improve human resources, and expand service coverage to ensure more inclusive and sustainable population control efforts.

Keywords: *Policy Implementation, Population Control, Family Planning, Child Protection*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk masih menjadi isu mendesak di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, karena memengaruhi alokasi sumber daya, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan sosial (Artisa, 2017). Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan serupa, yaitu tingginya angka kelahiran dan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan reproduksi, yang dapat memperparah kesenjangan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program keluarga berencana (KB) dan perlindungan anak untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya di tingkat lokal sering kali menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga penyuluh, dan resistensi sosial-budaya (Bappenas, 2021).

Studi-studi terdahulu tentang pengendalian penduduk di Indonesia sebagian besar berfokus pada hasil program atau dampak demografis dengan perhatian terbatas pada bagaimana dinamika implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi membentuk efektivitas program. Kebijakan kependudukan yang sukses tidak hanya membutuhkan penyediaan layanan tetapi juga keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor (Fonataba, 2025). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana model-model teoretis ini beroperasi dalam konteks sosial-budaya kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Dengan memakai perspektif Edwards III, penelitian ini tidak hanya berfokus pada dampak kependudukan secara angka dan statistik, tetapi juga mencoba memahami bagaimana kebijakan diterapkan secara nyata di tingkat kabupaten mulai dari bagaimana kebijakan nasional dipahami hingga bagaimana dijalankan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara langsung apa saja yang menjadi hambatan maupun yang mendukung pelaksanaan kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang lebih tepat untuk memperbaiki tata kelola lokal. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan memberi manfaat tidak hanya dalam penerapan kebijakan di lapangan, tetapi juga dalam memperkaya pemahaman akademik mengenai implementasi kebijakan kependudukan di Indonesia.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan pengendalian penduduk melalui program perlindungan anak dan keluarga berencana, penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama, yaitu teori implementasi kebijakan publik, teori pengendalian penduduk, dan konsep program perlindungan anak dan keluarga berencana. Penelitian ini mengacu pada teori George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam hal pengendalian penduduk digunakan pendekatan sosial demografi yang menekankan pentingnya keseimbangan kualitas dan jumlah penduduk melalui pendidikan dan keluarga berencana. Sedangkan perlindungan anak mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menekankan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peran keluarga dan kebijakan daerah.

Studi-studi sebelumnya mengenai kebijakan pengendalian penduduk di Indonesia jarang mengkaji bagaimana implementasinya berlangsung di tingkat lokal dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Studi ini menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo menggunakan model implementasi



kebijakan Edwards III. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat eksekusi kebijakan di tingkat daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dengan mengontekstualisasikan model Edwards III dalam kerangka tata kelola kependudukan terdesentralisasi di Indonesia, dan secara praktis dengan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola lokal, meningkatkan koordinasi, dan meningkatkan efektivitas pemberian layanan (Sipayung, 2022).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan pengendalian populasi melalui program keluarga berencana (KB) dan perlindungan anak di Kantor P3AKB Sidoarjo. Lokasi penelitian dilakukan di tiga kecamatan: Buduran, Taman, dan Krembung yang mewakili daerah perkotaan, semi-perkotaan, dan pedesaan di Kabupaten Sidoarjo. Situs-situs ini dipilih secara purposif untuk menangkap variasi dalam kepadatan demografis, latar belakang sosial ekonomi, dan akses ke layanan publik. Sebanyak 15 informan dipilih menggunakan sampling purposif, yang terdiri dari 3 pejabat DP3AKB, 5 petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), 2 kader kesehatan desa, dan 5 anggota masyarakat yang merupakan penerima manfaat langsung dari program. Kriteria pemilihan termasuk individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan atau partisipasi program dalam dua tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan semi terstruktur, observasi partisipatif selama sesi konseling dan kegiatan layanan kesehatan, serta tinjauan dokumen laporan program dan peraturan daerah. Semua wawancara dilakukan dengan persetujuan yang diinformasikan, memastikan kerahasiaan dan partisipasi sukarela sesuai dengan etika penelitian. Data dianalisis mencakup reduksi data, tampilan data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Kode tematik diterapkan untuk mengidentifikasi pola utama dan hubungan antara variabel. Kredibilitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, pemeriksaan anggota dengan informan kunci untuk mengonfirmasi interpretasi, dan menjaga jejak audit yang mendokumentasikan keputusan analitik sepanjang proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3AKB, petugas PLKB, kader, serta masyarakat, implementasi program keluarga berencana dan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo ditemukan dalam bentuk, bagian ini merupakan deskripsi hasil temuan-temuan dari proses analisis data.

Bentuk Implementasi Program di Lapangan

Untuk memahami bagaimana program kependudukan dan perlindungan anak dijalankan di masyarakat, tabel berikut menyajikan berbagai bentuk implementasi yang dilakukan di lapangan. Kegiatan-kegiatan ini menggambarkan upaya nyata pemerintah dalam memberikan penyuluhan, layanan, dan pendampingan kepada warga. Melalui tabel tersebut, terlihat bahwa program telah menyentuh berbagai aspek, mulai dari edukasi hingga pelayanan langsung.

Tabel 1. Bentuk Implementasi Program di Lapangan

No.	Bentuk Implementasi
1.	Penyuluhan KB di sekolah dan masyarakat
2.	Layanan konseling keluarga berencana
3.	Pemberian dan distribusi alat kontrasepsi
4.	Pendampingan kader kesehatan di desa

5.	Layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi
6.	Kampanye perlindungan hak anak
7.	Layanan pendampingan kasus kekerasan anak
8.	Program Bimtek kependudukan di beberapa kecamatan

Tabel 1 menunjukkan terkait bentuk implementasi program di lapangan, program-program yang dilaksanakan di lapangan mulai dari penyuluhan KB, layanan konseling, distribusi alat kontrasepsi, hingga pendampingan kader kesehatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kependudukan berjalan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap kegiatan memiliki fungsi strategis, seperti penyuluhan yang meningkatkan literasi kesehatan reproduksi, konseling yang membantu pasangan mengambil keputusan berbasis informasi, serta distribusi kontrasepsi yang memastikan akses merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, layanan pemeriksaan reproduksi, kampanye perlindungan hak anak, dan pendampingan kasus kekerasan anak memperlihatkan adanya upaya negara dalam melindungi kelompok rentan melalui intervensi langsung dan peningkatan kesadaran publik. Program Bimtek kependudukan turut melengkapi keseluruhan implementasi dengan memperkuat kapasitas aparatur di kecamatan agar mampu memanfaatkan data penduduk untuk perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut saling terkait dan menunjukkan bagaimana kebijakan kependudukan beroperasi tidak hanya pada level administratif, tetapi juga pada level sosial dan kultural masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu program yang dilaksanakan oleh sektor Dalduk adalah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek). Program ini dirancang untuk melibatkan warga dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis kependudukan. Melalui kegiatan ini, peserta diperkenalkan pada pentingnya data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Bimtek juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami dinamika kependudukan, seperti laju pertumbuhan penduduk, pola distribusi, serta struktur umur penduduk yang berdampak langsung pada perencanaan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan pernikahan dini.

Lebih lanjut, aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan Bimtek dijadikan sebagai bahan masukan penting dalam perancangan dan penyempurnaan program keluarga berencana serta perlindungan anak. Keterlibatan DPRD dalam kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman serta dukungan terhadap isu-isu kependudukan. Kehadiran DPRD juga memperkuat posisinya sebagai representasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Secara keseluruhan, pelaksanaan Bimtek ini mencerminkan adanya upaya kolaboratif lintas sektor dalam pengendalian penduduk dan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan program pengendalian penduduk dan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dirancang untuk menurunkan angka kelahiran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keluarga secara keseluruhan. Menurut Bapak Nanang Najmuddin, S.Ag, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP3AKB Sidoarjo, program ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Perencanaan keluarga yang baik



dipandang sebagai fondasi untuk membangun generasi penerus yang tangguh. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, konselor keluarga berencana, kader posyandu, dan tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan layanan, terutama di daerah terpencil. Pendekatan multi-aktor ini dipandang krusial bagi keberhasilan program.

Tabel 2. Kendala Implementasi Program

No	Kendala Implementasi
1.	Keterbatasan anggaran
2.	Keterbatasan jumlah tenaga PLKB
3.	Cukup sosialisasi yang tidak merata antar wilayah
4.	Jarak geografis menuju desa terpencil
5.	Persepsi masyarakat bahwa “banyak anak adalah rezeki”
6.	Minimnya literasi kesehatan reproduksi

Setelah melihat berbagai kendala yang tercantum dalam tabel 2 dapat dipahami bahwa pelaksanaan program KB di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beragam hambatan muncul dari aspek teknis, geografis, hingga sosial budaya yang memengaruhi kelancaran program. Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap kendala secara lebih mendalam agar solusi yang dirancang dapat tepat sasaran. Pelaksanaan program KB di lapangan menghadapi sejumlah tantangan yang saling berkaitan, mulai dari masalah dana, kurangnya tenaga, hingga rendahnya pemahaman masyarakat. Anggaran yang terbatas membuat banyak kegiatan seperti penyuluhan, pendistribusian alat kontrasepsi, hingga pendampingan kader tidak bisa berjalan maksimal, sedangkan jumlah PLKB yang sedikit membuat pelayanan terhambat karena satu petugas harus menangani wilayah yang luas. Sosialisasi yang tidak merata dan akses menuju desa terpencil juga menghambat penyebaran informasi sehingga beberapa wilayah tertinggal dalam hal pengetahuan maupun layanan. Selain faktor teknis, hambatan budaya seperti anggapan “banyak anak adalah rezeki” serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi turut memperlambat penerimaan program KB. Jika berbagai kendala ini tidak ditangani secara serius dan menyeluruh, maka efektivitas program KB akan terus terpengaruh dan manfaatnya tidak bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Tabel 3. Dampak Implementasi Program bagi Masyarakat

No.	Dampak Implementasi Program bagi Masyarakat
1.	Penurunan angka kelahiran pada pasangan usia subur
2.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perencanaan jumlah anak
3.	Peningkatan kesehatan ibu dan anak
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak
5.	Berkurangnya kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan
6.	Meningkatnya peran orang tua dalam pengasuhan

Berdasarkan berbagai dampak yang tercantum dalam tabel 3 dapat terlihat bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya berhenti pada kegiatan teknis, tetapi benar-benar memberikan pengaruh nyata pada kehidupan masyarakat. Dampak ini mencerminkan sejauh mana program KB dan perlindungan anak mampu mengubah pola pikir, perilaku, serta kondisi kesehatan keluarga. Untuk memahami pengaruh tersebut secara lebih utuh, berikut adalah penjelasan yang menggambarkan rangkaian perubahan yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan program KB dan perlindungan anak membawa sejumlah perubahan positif bagi masyarakat, mulai dari semakin rendahnya angka kelahiran di kalangan pasangan usia subur hingga



meningkatnya kesadaran keluarga dalam merencanakan jumlah anak. Masyarakat sekarang memahami bahwa mengatur kelahiran sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak, sehingga banyak keluarga memilih memberi jarak kehamilan untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Kampanye terkait hak anak juga membuat warga lebih sadar bahwa anak harus dilindungi, didengar, dan diberikan lingkungan yang aman untuk tumbuh. Pemahaman ini turut mendorong penurunan kasus kekerasan anak yang sebelumnya sering tidak dilaporkan karena masyarakat kini lebih berani melapor dan mencari bantuan. Tidak hanya itu, peran orang tua dalam pengasuhan juga semakin kuat karena mereka mulai menyadari pentingnya perhatian, kedekatan emosional, dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari anak. Secara keseluruhan, program-program tersebut membawa perubahan nyata yang memperbaiki kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan peduli terhadap kebutuhan anak.

Tabel 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program

No.	Jenis Faktor
1.	Komunikasi
2.	Sumber Daya
3.	Disposisi Pelaksana
4.	Struktur Birokrasi

Pada tabel 4 beberapa faktor yang saling berkaitan. Komunikasi yang jelas dan terarah menjadi hal penting karena menentukan seberapa baik informasi dapat dipahami oleh para pelaksana maupun masyarakat. Selain itu, ketersediaan sumber daya baik anggaran, tenaga, maupun fasilitas pendukung menentukan kelancaran kegiatan di lapangan. Sikap dan komitmen para pelaksana juga berperan besar; jika mereka memiliki motivasi dan tanggung jawab yang kuat, pelaksanaan program biasanya berjalan lebih efektif. Di sisi lain, struktur birokrasi yang mengatur alur kerja dan koordinasi antar instansi juga turut menentukan sukses tidaknya program, karena birokrasi yang teratur dan tidak berbelit akan memudahkan setiap proses yang harus dijalankan.

Pembahasan

Bentuk Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui Program Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo

Temuan empiris mengonfirmasi bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan penentu utama keberhasilan kebijakan, sejalan dengan model Edwards III yang menyoroti komunikasi dan sumber daya sebagai faktor kritis. Namun, kasus Sidoarjo menunjukkan bahwa model Edwards dapat diperluas dengan memasukkan keterlibatan budaya sebagai faktor mediasi. Persepsi budaya mengenai ukuran keluarga masih memengaruhi partisipasi dalam keluarga berencana, menggemarkan temuan dari Sagara et al. (2025) tentang perlunya kebijakan kependudukan yang peka budaya di negara-negara berkembang. Lebih lanjut, ketergantungan pada tenaga kesehatan dan kader setempat menunjukkan pentingnya disposisi pelaksana dan keterlibatan akar rumput, yang menurut studi internasional dapat meningkatkan efektivitas kebijakan secara signifikan bila dikombinasikan dengan partisipasi masyarakat yang kuat. Temuan ini juga mengungkap kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan sistem pemantauan, yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi perlu diperkuat untuk menghindari duplikasi dan memastikan tindak lanjut yang konsisten. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada teori dengan mengusulkan penyempurnaan model Edwards III yang spesifik terhadap konteks,



dengan menekankan interaksi antara kapasitas kelembagaan dan faktor budaya dalam membentuk hasil kebijakan dalam pengaturan yang terdesentralisasi (Adam et al., 2021).

Implementasi pedoman pengelolaan kependudukan melalui program anak dan program keluarga berencana di bidang penguatan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana (P3AKB) oleh Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penurunan angka kelahiran yang tinggi, peningkatan ketersediaan sumur keluarga, dan perlindungan hak-hak anak. Dinas P3AKB Sidoarjo bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan saran, edukasi, dan akses kepada keluarga terhadap layanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi (Firnanda & Prabawati, 2020).

Proses penerapan pedoman tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah Program Penyuluhan Masyarakat. Agenda ini bertujuan untuk memaksimalkan pendalamannya masyarakat akan pentingnya keluarga berencana dan perlindungan anak yang baik. Selain itu, kantor P3akb juga menyediakan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan reproduksi, penyediaan alat kontrasepsi dan layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program keluarga berencana. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah rasa kebersamaan. Namun, dalam implementasinya terdapat banyak tantangan terhadap pedoman untuk manajemen kependudukan melalui program anak dan keluarga berencana. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari beberapa kelompok yang memandang banyak anak sebagai simbol status sosial dan kayu keluarga. Hal ini mencegah penerimaan program keluarga berencana di beberapa kalangan, terutama di daerah yang lebih konservatif. Selain itu, terdapat kekurangan sumber daya untuk implementasi karyawan dan terdapat kegiatan ekspansi dan layanan kesehatan yang terkait dengan instansi yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi arahan. Meskipun menghadapi tantangan, implementasi pedoman ini telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Program keluarga berencana di Sidoarjo telah berhasil menurunkan angka kelahiran pasangan usia subur. Selain itu, program perlindungan anak juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak di lapangan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyempurnaan implementasi pedoman ini.

Program Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Dinas P3AKB Sidoarjo

Upaya strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian jumlah anggota keluarga dan perlindungan hak-hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki peran utama dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan terkait program perlindungan anak dan keluarga berencana (KB). Agenda ini bertujuan untuk memberikan pengalaman keluarga berencana yang baik kepada masyarakat, serta memberikan dukungan medis melalui konseling dan distribusi alat kontrasepsi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Salah satu fokus utama program ini adalah penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keluarga berencana yang baik dan manfaat KB. Melalui pendekatan ini, Dinas P3AKB berupaya mengubah pola pikir masyarakat yang masih memandang banyak anak sebagai simbol status sosial. Penyuluhan dilakukan baik secara langsung maupun melalui berbagai media komunikasi agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh wilayah Sidoarjo. Dengan



melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak usia dini (Fitria, 2024).

Selain itu, Dinas P3AKB juga melaksanakan program perlindungan anak dengan mengedukasi orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak dan upaya perlindungan mereka dari kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. Program ini mencakup kegiatan penyuluhan bagi keluarga tentang pentingnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak yang sehat dan aman. Perlindungan anak juga diwujudkan melalui layanan kesehatan anak, imunisasi, dan pendidikan yang memadai bagi anak-anak di wilayah tersebut. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya setempat yang masih menganggap memiliki banyak anak sebagai suatu keuntungan, sehingga penerimaan program KB di sebagian masyarakat masih rendah. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga pelaksana, juga menjadi kendala dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas program. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan dukungan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, dan memperkuat sarana prasarana pendukung program KB dan perlindungan anak di Sidoarjo.

Kendala dalam Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak di Lapangan

Dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, masih banyak kendala yang membuat hasilnya belum maksimal. Masalah paling awal adalah anggaran yang terbatas, sehingga kegiatan seperti penyuluhan, pendistribusian alat kontrasepsi, maupun operasional petugas di lapangan tidak bisa berjalan semaksimal yang diharapkan. Jumlah tenaga PLKB yang sedikit juga menjadi tantangan, karena satu petugas harus menangani wilayah yang luas sehingga pendampingan kepada warga tidak bisa dilakukan secara rutin. Akibatnya, sosialisasi pun tidak merata daerah yang dekat dengan pusat kecamatan lebih sering mendapat informasi, sementara desa yang jauh atau terpencil sering kali terlewat. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat petugas membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk mencapai lokasi tertentu, sehingga tidak semua wilayah bisa mereka datangi secara berkala (Trianziani, 2018).

Selain hambatan teknis, kendala dari sisi budaya juga cukup kuat. Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa “banyak anak adalah rezeki,” sehingga mereka ragu atau menolak mengikuti program KB. Ditambah lagi, tingkat literasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi masih rendah, membuat mereka mudah terpengaruh oleh mitos dan kurang memahami manfaat merencanakan kehamilan. Berbagai faktor tersebut saling berhubungan dan menyebabkan program tidak bisa berjalan seoptimal yang direncanakan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat layanan.

Dampak Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Melalui Program Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Dinas P3AKB Sidoarjo

Implementasi kebijakan pengendalian penduduk melalui program perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak utama dari kebijakan ini adalah penurunan angka kelahiran. Dengan adanya program Keluarga Berencana (KB), masyarakat Sidoarjo semakin menyadari pentingnya merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan sosial keluarga. Penurunan angka kelahiran ini berkontribusi pada



penurunan jumlah penduduk yang cepat, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengelola sumber daya. (Cahyaningrum, 2023)

Selain itu, program ini juga meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Melalui penyuluhan kesehatan reproduksi, program keluarga berencana tidak hanya berfokus pada pembatasan jumlah anak, tetapi juga meningkatkan kondisi kesehatan ibu hamil, memperkenalkan metode kontrasepsi yang aman, dan menyediakan layanan medis terkait. Program perlindungan anak yang terintegrasi dalam kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan perlindungan hak anak dari kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, program ini berperan dalam memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dampak signifikan lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran orang tua dalam membesarkan anak. Program perlindungan anak di Dinas P3AKB Sidoarjo tidak hanya memberikan edukasi tentang keluarga berencana, tetapi juga tentang pentingnya mendidik dan merawat anak dengan kasih sayang serta memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak. Hal ini berkontribusi dalam mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kualitas pengasuhan dalam keluarga.

Namun, di balik dampak positifnya, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah resistensi sosial di sebagian masyarakat yang masih menganggap memiliki banyak anak sebagai simbol status atau kebanggaan. Faktor budaya ini menyulitkan sebagian kelompok untuk menerima pesan program keluarga berencana. Selain itu, akses yang belum merata terhadap layanan keluarga berencana dan perlindungan anak di seluruh wilayah Sidoarjo menjadi kendala dalam memastikan dampak kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Secara keseluruhan, di balik tantangan dalam implementasinya, dampak kebijakan pengendalian penduduk melalui program perlindungan anak dan keluarga berencana di Sidoarjo cenderung positif. Kebijakan ini berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menjamin perlindungan hak-hak anak. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya, perlu dilakukan perbaikan dalam penyuluhan, peningkatan akses layanan, dan penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak terjadi secara otomatis setelah kebijakan ditetapkan. Dalam proses implementasi, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Meskipun formulasi kebijakan sudah matang, tanpa implementasi yang tepat dan efektif, tujuannya sulit tercapai. Menurut (Edwards, 1980) terdapat empat faktor utama yang berperan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan. Di Sidoarjo, DP3AKB menyebarluaskan informasi tentang keluarga berencana dan perlindungan anak melalui sekolah, pertemuan masyarakat, dan sesi konseling. Namun, temuan kami menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi akibat keterbatasan anggaran dan penjangkauan yang tidak merata. Seorang petugas PLKB mencatat: Tidak semua sekolah menerima konseling karena keterbatasan anggaran, sehingga beberapa siswa dan orang tua tidak mengetahui program tersebut. (Nani, 2021).

Sumber daya, termasuk dukungan manusia, keuangan, dan infrastruktur, merupakan faktor kunci yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya yang memadai memungkinkan pelaksana kebijakan menjalankan program secara optimal dan berkelanjutan. Di Kabupaten Sidoarjo, DP3AKB masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kepegawaian dan keterbatasan anggaran



operasional. Kondisi ini berdampak langsung pada jangkauan layanan serta intensitas kegiatan lapangan, khususnya di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang kader kesehatan masyarakat, keterbatasan logistik dan jarak tempuh yang jauh menyebabkan jumlah masyarakat yang dapat diberikan konseling setiap minggu menjadi terbatas (Muhammad, 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berimplikasi pada kualitas dan pemerataan layanan kebijakan di tingkat akar rumput.

Komitmen dan sikap pelaksana kebijakan berperan penting dalam membentuk tingkat keterlibatan masyarakat di tingkat lokal. Pelaksana yang memiliki motivasi tinggi dan pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan cenderung lebih proaktif dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan setempat. Dalam konteks program keluarga berencana di Sidoarjo, petugas lapangan yang aktif membangun komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kepercayaan sosial yang kuat antara masyarakat dengan figur-firug lokal yang dihormati. Sebagaimana dilaporkan oleh seorang pejabat DP3AKB, kolaborasi yang erat antara petugas dan tokoh masyarakat membuat keluarga lebih terbuka dan bersedia menghadiri sesi konseling. Dengan demikian, disposisi pelaksana tidak hanya mencerminkan sikap individu, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan.

Struktur organisasi birokrasi dan koordinasi antar-lembaga sangat menentukan konsistensi serta efisiensi implementasi kebijakan (Fransiska et al., 2025). Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Sidoarjo merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kehadiran satgas ini telah meningkatkan pertukaran informasi dan pembagian peran antar instansi terkait. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian koordinasi antar-lembaga yang berdampak pada ketimpangan penyampaian program. Meskipun telah tersedia prosedur operasi standar, lemahnya komunikasi dan koordinasi antar dinas menyebabkan keterlambatan implementasi di beberapa wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang formal belum tentu menjamin efektivitas kebijakan tanpa dukungan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.

Selain faktor-faktor yang dikemukakan dalam model Edwards III, Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kondisi sosial-politik, karakteristik organisasi pelaksana, serta tingkat dukungan masyarakat (Sari & Rahayu, 2021). Kejelasan tujuan kebijakan membantu pelaksana memahami arah dan prioritas program yang dijalankan. Sementara itu, kondisi sosial-politik setempat dapat memperkuat atau justru menghambat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Karakter organisasi pelaksana, termasuk budaya kerja dan kapasitas institusional, turut menentukan kualitas implementasi di lapangan. Dukungan masyarakat menjadi faktor penentu terakhir yang memastikan keberlanjutan kebijakan. Seluruh elemen tersebut saling berkaitan dan membentuk ekosistem implementasi kebijakan yang kompleks.

Ringkasan Analitis

Penerapan model Edwards III dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi saling berinteraksi dalam memengaruhi hasil kebijakan. Tidak satu pun faktor yang bekerja secara tunggal, melainkan membentuk hubungan dinamis yang menentukan efektivitas implementasi di tingkat lokal. Dalam konteks Sidoarjo, persepsi dan nilai budaya masyarakat berperan sebagai faktor mediasi yang memengaruhi respons terhadap program kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada desain formal, tetapi juga pada kesesuaian



dengan konteks sosial dan budaya setempat. Secara teoretis, studi ini berkontribusi dengan mengusulkan model implementasi yang disempurnakan dan spesifik konteks. Model tersebut mengintegrasikan kapasitas kelembagaan serta faktor budaya dalam kerangka kebijakan kependudukan yang terdesentralisasi, sehingga lebih relevan dengan kondisi empiris di lapangan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dan perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan hasil positif yang terukur, termasuk penurunan angka kelahiran, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, dan peningkatan perlindungan hak-hak anak. Namun, tantangan seperti resistensi budaya, akses layanan yang tidak merata, dan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan masih terus berlanjut yang menghambat efektivitas penuh program. Implikasi Kebijakan: Untuk memperkuat dampak program, pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam strategi komunikasi yang peka budaya, memperluas jumlah dan kapasitas petugas PLKB, serta meningkatkan koordinasi antara P3AKB, puskesmas, dan pemerintah desa. Langkah-langkah ini dapat memastikan akses yang lebih merata terhadap layanan dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih kuat.

Kontribusi Teoretis: Studi ini memperluas model implementasi kebijakan Edwards III dengan secara eksplisit menekankan pentingnya faktor sosial budaya sebagai variabel mediasi yang memengaruhi efektivitas komunikasi dan hasil program. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks negara berkembang yang terdesentralisasi, kerangka kerja implementasi tradisional sebaiknya mengintegrasikan adaptasi budaya di samping pertimbangan struktural dan sumber daya untuk menjelaskan dan memprediksi keberhasilan kebijakan dengan lebih baik. **Kontribusi Praktis:** Bagi para pembuat kebijakan dan praktisi, studi ini menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang peka budaya, perluasan dan peningkatan kapasitas petugas PLKB, serta penguatan koordinasi antarlembaga antara P3AKB, puskesmas, dan pemerintah desa. Penerapan langkah-langkah ini dapat meningkatkan cakupan layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan akses yang adil terhadap program keluarga berencana dan perlindungan anak. **Penelitian Mendatang:** Studi lanjutan dapat mengadopsi analisis komparatif di berbagai kabupaten atau provinsi, mengeksplorasi integrasi teknologi digital dalam meningkatkan jangkauan keluarga berencana, dan menggunakan metode campuran untuk mengukur hubungan antara kualitas implementasi program dan hasil demografi. Penelitian semacam itu akan menyempurnakan penerapan teori implementasi kebijakan dalam konteks budaya dan kelembagaan yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., Salomo, R. V., & Riady, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 109-116. <https://doi.org/10.69989/mf8r2v02>
- Artisa, R. A. (2017). Policy Paper: Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Nasional. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 9-23. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/269>
- Bappenas. (2021). *Laporan pembangunan kependudukan dan keluarga di Indonesia*.
- Bastian, M. A., & Tukiman, T. (2022). Implementation of Joint Program Protect Children in The Protection of Child Victims of Violence at The Women's Empowerment Service of



- Child Protection and Family Planning, Sidoarjo Regency. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(4), 482-494. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i4.2813>
- Cahyaningrum, A., Widodo, D., & Soesiantoro, A. (2023). Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (Dp3akb) Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(01), 188-199. <https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1074>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(5). <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p>
- Fitria, L., & UB, A. R. (2024). Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1684-1697. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.995>
- Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376-1395. <http://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/373>
- Fransiska, W., Pratama, M. N. R. F., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Kajian Literatur Model Administrasi Integratif dalam Hubungan Antara Struktur Organisasi, Sistem Negara, dan Nilai-Nilai Publik. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 1391-1400. <https://doi.org/10.54082/jupin.1473>
- Muharram, F., Cholifah, S., & Utami, P. J. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 274-287. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3790>
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., & Satispi, E. (2024). Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter and Van Horn models. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 6(1), 37-46. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 231-240. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/463>
- Sagara, R., Setiawan, A. H., & Purnawan, E. (2025). Dinamika Kependudukan dan Ketenagakerjaan: Tantangan dan Kebijakan Berkelanjutan untuk Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 317-329. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3629>
- Sari, R. P., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10(1), 230-238. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4355>
- Sipayung, S. L. (2022). Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Selama Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 284-292. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2561>
- Trianziani, S. (2018). Pelaksanaan program keluarga berencana oleh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 131-149. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i4.1812>